

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muhamad Razak
Npp. 29.1606

Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: razak.ipdn29@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by three things, namely the management system in an effort to develop tourism objects by the state civil apparatus of the tourism office is still not optimal, the target and realization of levies for the tourism sector from year to year is still not maximized, and there is no regional income that goes into the treasury. areas of the tourism sector in 2020. **Objectives:** The purpose of this study was to determine, analyze, and describe the performance of the State Civil Apparatus at the Tourism Office of Muna Regency. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach and analysis of the performance of the state civil apparatus according to the theory of effectiveness according to Dwiyanto by covering several dimensions, productivity, service quality, responsiveness, responsibility, accountability. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** The performance of the state civil apparatus of the tourism office of Muna Regency, Southeast Sulawesi Province has not been maximized, marked by the achievement of performance indicators, but every year the apparatus always makes improvements and performance improvements. **Conclusion:** The performance of the Muna Regency Tourism Office apparatus in managing Muna Regency tourism objects has not been maximized. This can be seen from the achievements of the five performance indicators. The inhibiting factor in the management of tourism objects in Muna Regency, namely the facilities and infrastructure supporting tourism are still inadequate. One of them is the existence of public toilets and changing rooms and the availability of parking spaces that are still narrow. In addition, the cleanliness of the tourist attraction environment has not been maintained, as well as the weak administration and supervision system of the Tourism Office

Keywords: performance, tourism object development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini di latar belakang oleh tiga hal, yaitu Sistem pengelolaan dalam upaya pengembangan objek wisata oleh aparatur sipil negara dinas pariwisata masih kurang optimal, Target dan realisasi retribusi sektor pariwisata dari tahun ke tahun masih belum maksimal, dan Tidak adanya pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah dari sektor pariwisata pada tahun 2020, **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Muna **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap kinerja aparatur sipil negara menurut teori efektivitas menurut Dwiyanto dengan mencakup beberapa dimensi, produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** kinerja aparatur sipil negara dinas pariwisata Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum maksimal di tandai dari pencapaian indikator kinerja namun setiap tahunnya aparatur selalu melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja. **Kesimpulan:** Kinerja aparatur

Dinas Pariwisata Kabupaten Muna dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Muna belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian lima indikator kinerja. Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Muna yaitu sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan masih kurang memadai. Salah satunya keberadaan toilet umum dan kamar ganti serta ketersediaan lahan parkir yang masih sempit. Selain itu, kebersihan lingkungan objek wisata belum terjaga, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan Dinas Pariwisata

Kata kunci: kinerja, pengembangan objek wisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 5 pulau besar dan 17.535 pulau lainnya. Wilayah laut Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Dengan jumlah pulau yang banyak dan luas wilayah Indonesia, maka negara kita memiliki banyak potensi alam dan destinasi wisata alam maupun peninggalan sejarah serta berbagai keunikan adat-istiadat budayanya yang sudah terbukti mampu menarik wisatawan asing maupun lokal untuk berkunjung.

Pariwisata bisa dikatakan sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan guna memperoleh pendapatan wilayah yang juga termasuk dalam proses pembangunan perekonomian nasional. Namun, kedatangan turis mancanegara tahun 2020 yang sejumlah 4.052.933 mendapati perubahan yang menurun sebesar 74,84% di bandingkan tahun 2019 yang sejumlah 16.108.610 kunjungan.

Persepsi tentang mutu suatu organisasi pelayanan sangat berubah-ubah karena bersifat subyektif. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati (Winston Dictionary.1956).

Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan kinerja dalam suatu instansi dalam upaya peningkatan untuk pelayanan masyarakat belum berfungsi secara maksimal dalam mekanisme pelayanan masyarakat serta peningkatan kinerja dalam meningkatkan target dan tugas dari suatu instansi, hal ini dipengaruhi oleh tidak disiplinnya ASN dalam kinerja, sehingga program pelayanan masyarakat terkendala karena etos kerja yang tidak maksimal. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Muna, ternyata sikap kurang/tidak disiplin masih terlihat di kalangan aparatur pemerintah daerah ini, sebagaimana ditunjukkan dengan beberapa perilaku seperti datang ke kantor tidak tepat waktu, tidak teliti dalam bekerja, etos kerja rendah menyebabkan pegawai bolos kerja, serta tidak ada kesadaran diri sebagai pegawai yang berperan melayani masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi *Covid-19* yang berdampak juga pada Kabupaten Muna yang mana pada awal tahun 2021 ini telah dibuka kembali sektor pariwisata dengan pertimbangan pada tahun 2020 yang lalu sama sekali tidak ada pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah dari sektor pariwisata. Melihat hal ini pemerintah sangat antusias dalam peningkatan daya tarik masyarakat yang berbasis protokol kesehatan dengan mengelola seluruh sumber retribusi secara optimal maka pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sektor pariwisata bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta diperlukan pula adanya peningkatan kualitas kerja, peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian, dan melakukan kerja sama antara pemerintah selaku pihak pengelola pariwisata dengan pihak investor dan masyarakat di Kabupaten Muna selaku pendukung dalam kesuksesan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Muna.

Sistem pengelolaan dalam upaya pengembangan objek wisata oleh aparatur sipil negara dinas pariwisata masih kurang optimal, dengan kata lain belum dilakukan secara maksimal dan merata. Selain itu masalah yang terjadi ditimbulkan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh aparat instansi terkait seperti penyediaan tempat sampah sehingga menyebabkan banyak sampah yang berserakan di area wisata dan merusak keindahan tempat wisata. Selain itu, aksesibilitas yang dimiliki masih kurang ditandai dengan kurangnya alat transportasi yang disediakan oleh instansi terkait seperti bus pariwisata. Dari faktor sumber daya manusianya juga aparatur sipil Dinas Pariwisata kabupaten Muna masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. Jumlah ASN pada Dinas Pariwisata Kabupaten Muna sejumlah 25 orang dan terdapat beberapa pegawai yang kurang pengetahuan dalam bidang kepariwisataan, Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di dinas terkait. Di sisi lain, belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuktikan dengan kurang lengkap informasi yang terdapat pada *website* milik Dinas Pariwisata Kabupaten Muna.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan aparatur sipil negara Dinas Pariwisata, ada beberapa persoalan yang terdapat pada kinerja aparatur dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Muna, masalah yang terjadi ditimbulkan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh aparat instansi terkait seperti penyediaan tempat sampah sehingga menyebabkan banyak sampah yang berserakan di area wisata dan merusak keindahan tempat wisata. Selain itu, aksesibilitas yang dimiliki masih kurang ditandai dengan kurangnya alat transportasi yang disediakan oleh instansi terkait seperti bus pariwisata. Dari faktor sumber daya manusianya juga aparatur sipil Dinas Pariwisata kabupaten Muna masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. Jumlah ASN pada Dinas Pariwisata Kabupaten Muna sejumlah 25 orang dan terdapat beberapa pegawai yang kurang pengetahuan dalam bidang kepariwisataan, Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di dinas terkait. Di sisi lain, belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuktikan dengan kurang lengkap informasi yang terdapat pada *website* milik Dinas Pariwisata Kabupaten Muna.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama Elyas M. Yarawobi (2020) Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nabire Dalam Pengembangan Objek Wisata Hiu Paus di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nabire dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus belum cukup baik, hambatan yang dialami adalah keterbatasan sarana dan prasarana kepariwisataan yang dimiliki dinas kebudayaan dan pariwisata, Kedua, Tina (2019) Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung Dinas Pariwisata melakukan berbagai promosi melalui media *online*, event-event, pameran, spanduk dan brosur. Peningkatan motivasi dengan memberi pelatihan pada masyarakat. Dinas Pariwisata melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pulau tersebut dengan memberikan arahan dan sosialisasi dalam pembuatan souvenir.

Ketiga, Titus Karmala (2020) Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pengembangan objek wisata alam di Kota Sorong menunjukkan hasil yang belum maksimal, karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditentukan pada komponen sistem pengembangan pariwisata yang menjadi indikator pengembangan objek wisata alam.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penulis.

1.5. Tujuan

Tujuan pelaksanaan penelitian magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan hambatan Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata dalam upaya pengembangan objek wisata Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Aparatur Sipil

Negara Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat penting dalam penelitian, mengingat tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data dimana data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan penyelesaian penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini sejatinya menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan induktif dimana pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan dan pendekatan lapangan. Teknik ini dilakukan dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis terhadap kinerja aparatur menurut teori Dwiyanto dengan indikator kinerja, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KABUPATEN MUNA

Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur sipil negara dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Muna, maka penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan kinerja aparatur sipil negara dinas pariwisata di Kabupaten Muna, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto yang meliputi 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Produktivitas

Dalam pengembangan objek wisata sebagai bentuk kinerja aparatur, kepala dinas pariwisata dan jajaran harus memperhatikan indikator kinerja produktivitas. pelaksanaan pengembangan objek wisata telah dilakukan hanya saja masih lambat, khususnya pembangunan infrastruktur. Pihak Dinas Pariwisata terus berupaya melakukan pengembangan, tetapi belum bisa dilakukan pembangunan karena ada kendala kepemilikan lahan, sehingga pengembangan dialihkan ke objek wisata yang lain. Namun, Dinas Pariwisata terus berusaha dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah. Di sisi lain, pada bidang promosi, telah dilakukan promosi dengan baik dengan beberapa metode yaitu penggunaan media sosial, pembagian tabloid serta berpartisipasi dalam fersitival-festival nasional. Telah dilakukan perencanaan promosi melalui layar yang akan ditempatkan di beberapa titik-titik tempat yang banyak dilalui masyarakat, namun belum bisa dilakukan karena masih terkendala oleh danapelaksanaan manajemen objek wisata pada berbagai bidang sudah dilaksanakan dengan baik namun terdapat beberapa kendala. Dinas Pariwisata selalu berusaha melakukan pengembangan dan mengatasi kendala-kendala tersebut

Dalam pengelolaan pada bidang pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengelolaan. Hal itu dilakukan agar pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu dimana Kepala Dinas Pariwisata merencanakan beberapa strategi dalam melaksanakan pengelolaan. Dinas Pariwisata telah mempunyai perencanaan yang baik dengan melakukan kunjungan pada Kepala Desa Loghia untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar yang baik mengenai kepemilikan tanah agar pembangunan daerah wisata Pantai Maleura dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengelolaan merupakan kegiatan inti dari pengembangan atau pembangunan sebuah objek wisata. Pelaksanaan yang dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal dan berdasarkan tugas yang telah diberikan dari masing-masing bagian. Dengan adanya pelaksanaan maka dapat dilihat apakah tujuan dapat dicapai dan perencanaan yang dibuat dapat berjalan dengan lancar ataupun ada hambatan-hambatan yang terjadi.

Pelaksanaan manajemen objek wisata Kabupaten Muna yang dilakukan untuk mengembangkan objek wisata ini telah dilakukan. Rencana-rencana yang telah ditentukan beberapa telah dilaksanakan dan adapula yang masih dalam proses. Selain pelaksanaan pembangunan salah satu yang menjadi faktor dalam majunya pariwisata suatu daerah dan berhasilnya pengembangan suatu objek wisata adalah kemampuan promosi yang baik sehingga masyarakat dapat tertarik mengunjungi suatu daerah. pengembangan objek wisata telah dilakukan hanya saja masih lambat, khususnya pembangunan infrastruktur. Pihak Dinas Pariwisata terus berupaya melakukan pengembangan, tetapi belum bisa dilakukan pembangunan karena ada kendala kepemilikan lahan, sehingga pengembangan dialihkan ke objek wisata yang lain. Namun, Dinas Pariwisata terus berusaha dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah. Di sisi lain, pada bidang promosi, telah dilakukan promosi dengan baik dengan beberapa metode yaitu penggunaan media sosial, pembagian tabloid serta berpartisipasi dalam fersitival-festival nasional. Telah dilakukan perencanaan promosi melalui layar yang akan ditempatkan di beberapa titik-titik tempat yang banyak dilalui masyarakat, namun belum bisa dilakukan karena masih terkendala oleh dana.

2. Kualitas pelayanan

Isu mengenai kualitas pelayanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. bahwa fasilitas di area destinasi wisata Pantai Maleura setiap tahunnya mengalami kemajuan yaitu dengan dibangunnya area khusus untuk pengusaha lokal. Namun untuk kebersihan lingkungan yang diamati oleh penulis masih kurang maksimal. Walaupun tersedianya tempat pembuangan sampah, tetapi kurangnya kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan cukup banyak sampah yang berserakan di area Pantai Maleura. promosi dari objek wisata memang masih kurang optimal walaupun ada beberapa objek wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan bahkan dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan objek wisata Danau Napabale juga banyak yang menyebutnya sebagai Raja Ampat versi Kabupaten Muna.

3. Responsivitas

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti suatu sarana dan prasarana yang telah menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan-pelayanan yang ada seperti mushola, makanan dan minuman, tempat olahraga, dan lainnya.

Berikut adalah data mengenai saranan dan prasarana objek wisata Pantai Maleura sebagai objek wisata favorit:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Pantai Maleura
Tahun 2019-2021

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun (unit)
-----	----------------------	--------------

		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	MCK	4	4	6
2	Mushola	1	1	1
3	Posko Keamanan	1	2	2
4	Tempat Olahraga	-	-	-
5	Gedung Pusat Kuliner	-	-	1
6	Toko Cenderamata	-	-	-
7	Tempat Berbelanja	4	9	12
8	Tempat Sampah	12	15	15
9	Tempat Bermain	1	2	2
10	Rumah makan/Restoran	2	4	5

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, 2021

Tabel 4.4 menunjukkan data sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Maleura dari Tahun 2019-2021 ada yang mengalami peningkatan dan ada yang hanya seperti tahun-tahun sebelumnya.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Aparatur dari Dinas Pariwisata sudah menjalankan tugasnya dengan baik hanya ada beberapa kekurangan kemungkinan seperti pemeliharaan fasilitas yang ada di wisata Pantai Maleura. Aparatur menjalankan tugas dan pokoknya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tingkat keamanannya juga diutamakan guna meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang berkunjung dan Dinas Pariwisata harus aktif dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Muna.

5. Akuntabilitas

Dalam arti sempit Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (LAKIP) jawaban tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan bentuk dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan misi instansi dalam bentuk aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemangku jabatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pengembangan objek wisata di Kabupaten Muna dalam hal pelaporan terhadap pelaporan kegiatan organisasi cukup baik. Contohnya telah terlaksana pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai per tahun. Tingkat pelaporan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Muna cukup baik, karena mampu melaporkan dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan di setiap objek wisata yang berada di Kabupaten Muna dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Muna

1. Perilaku Masyarakat dan Pengunjung

Pola perilaku masyarakat dan pengunjung yang ada di sekitar objek wisata ini merupakan masyarakat yang tidak menjaga lingkungan yang kondusif pada objek wisata. Dimana masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah secara sembarangan adapula yang melakukan sabotase terhadap fasilitas yang ada di area objek wisata. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan untuk membuang sampah pada tempatnya mempengaruhi

pengembangan objek wisata Danau Napabale. Dimana keadaan danau akan kotor dan tidak terlihat indah dan membuat pengunjung lain nyaman. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk mengatasi masalah dengan membuat tempat sampah namun kesadaran pribadi dari pengunjung belum ada. Bagaimanapun pemerintah berusaha untuk menjaga kebersihan objek wisata tersebut tanpa dibarengi dengan kesadaran dari masyarakat akan sia-sia. Dengan demikian maka objek wisata akan sulit berkembang, begitu pula yang terjadi pada objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Muna. Selain perilaku masyarakat tidak menjaga kebersihan dari lingkungan objek wisata, perilaku lain yang membuat pengunjung lain tidak nyaman yaitu masyarakat sekitar yang sering mabuk-mabukan. pengunjung resah dan tidak nyaman yaitu perilaku mabuk-mabuk masyarakat setempat. Dimana masyarakat yang terpengaruh dengan minuman keras membuat lingkungan tidak kondusif. Khususnya pengunjung wanita merasa tidak nyaman dan takut dengan hal tersebut. Mereka berharap kedepannya ada pengamanan untuk masalah tersebut agar pengunjung tidak perlu takut untuk menikmati pemandangan yang indah di objek wisata Danau Napabale.

Secara keseluruhan yang menjadi faktor penghambat dalam manajemen objek wisata di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kepemilikan tanah, pembangunan fasilitas utama yang kurang maksimal serta perilaku masyarakat dan pengunjung dalam menjaga lingkungan yang kondusif pada objek wisata masih kurang.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung Belum Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat pengembangan suatu objek wisata. Para wisatawan merasa senang apabila objek wisata yang dikunjungi itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan mendukung. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap minat dari para wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut dan memberikan kepuasan bagi wisatawan. sarana dan prasarana yang dibangun masih belum memberikan kenyamanan buat para pengunjung. Hal ini karena sarana dan prasarana yang ada belum memadai.

3. Lemahnya Sistem Administrasi dan Pengawasan Dinas Pariwisata

sistem pengawasan dari segi administrasi pungutan retribusi ataupun pengawasan secara langsung dan menyeluruh perihal objek wisata masih cukup lemah dan belum berjalan dengan baik. Dari segi administrasi pemungutan retribusi yaitu masih sering ditemukan oknum pemungut retribusi yang melakukan pemungutan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan penyelewengan. Kemudian dari segi pengawasan secara langsung dan menyeluruh, yaitu sering kali ditemukan inventaris-inventaris penunjang destinasi pariwisata yang rusak bahkan sampai hilang dicuri. Permasalahan tersebut terjadi akibat belum maksimalnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi sistem pemungutan retribusi dan menjaga inventaris-inventaris penunjang pariwisata. kondisi di Pantai Meleura kondisi seperti yang dikatakan tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya proses pengelolaan yang dilakukan. Hal tersebut merupakan bagian dari proses yang kurang tepat. Tampak kurang terawat dan tidak dikelola dengan baik. Fasilitas Umum seperti kamar kecil (toilet) jumlahnya sangat minim hanya terdapat 6 (enam) kamar kecil dimana 4 (empat) dalam kondisi rusak ringan, pembangunan MCK memang bertambah dari tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang datang maka jumlah toilet tersebut masih tergolong belum cukup.

3.3 Upaya Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Muna

1. Melakukan Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas yang Belum Memadai

Dinas Pariwisata adalah sebagai instansi pemerintah daerah yang mengurus urusan pilihan pariwisata di daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan pariwisata yang ada di daerah. Terwujudnya Kabupaten Muna sebagai daerah tujuan wisata yang aman, serasi, maju, dan berkelanjutan merupakan visi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Muna. Dinas Pariwisata sebagai instansi pemerintah daerah yang mengurus urusan pilihan pariwisata di daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan pariwisata yang ada di daerah. Pelaksanaan pengembangan pariwisata di

daerah perlu didukung dengan anggaran yang memadai, proses penentuan rencana kerja yang prioritas secara tepat dan teliti, serta didukung dengan perilaku masyarakat yang baik serta aturan yang kuat dan jelas. Menambah fasilitas sarana dan prasarana pada objek wisata dengan memperhatikan potensi yang dimiliki objek wisata tersebut. Dinas Pariwisata saat ini sudah mulai melakukan perbaikan dan pengembangan terkait fasilitas pendukung sektor pariwisata, seperti membuat gazebo yang lebih menarik dan nyaman untuk para wisatawan yang berkunjung, membangun pusat informasi pariwisata pada objek wisata Kabupaten Muna, serta memperbaiki sistem pelayanan kepada para wisatawan.

2. Penataan Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam bekerja sama dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk membuat tempat sampah di objek wisata tersebut agar dapat menumbuhkan kesadaran dari pengunjung/wisatawan yang masih membuang sampah di sembarang tempat dengan tujuan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan dari objek wisata. Dinas Pariwisata telah bekerja untuk selalu menjaga kebersihan sekitaran objek wisata untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke wisata Pantai Meleura di Kabupaten Muna.

3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata

Meningkatkan sistem pengawasan, dimana Pariwisata Kabupaten Muna terus melakukan perbaikan terhadap pemungutan dan penerimaan retribusi daerah, salah satunya dengan melakukan peninjauan langsung kondisi lapangan secara intensif agar dapat mengontrol proses pemungutan dan penerimaan retribusi daerah, melakukan inspeksi mendadak terkait proses pemungutan dan penerimaan retribusi daerah untuk mengetahui letak permasalahan yang terjadi saat ini, serta menegakkan sanksi secara ketat guna tidak terjadinya penyelewengan pada saat proses pemungutan dan penerimaan retribusi daerah dan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga dapat mendorong pencapaian target retribusi daerah pada pada sektor pariwisata sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Melakukan Evaluasi dan Sosialisasi Terhadap Peran Dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pada Masyarakat Dalam Menjaga Kondusifitas Objek Wisata. Kondisi dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang kondusif pada objek wisata Danau Napabale serta kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kebersihan dan keindahan objek wisata, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peran dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang telah dibentuk oleh Dinas Pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan hambatan yang ada. Dimana melihat POKDARWIS yang telah dibentuk tersebut sudah melaksanakan perannya dengan baik atau belum sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan objek wisata yang kondusif, aman dan nyaman, dimana POKDARWIS yang dibentuk berasal dari daerah tersebut sehingga seharusnya mampu untuk melakukan sosialisasi tersebut dengan baik. Dengan adanya POKDARWIS tersebut seharusnya dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat serta pengunjung yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Muna belum maksimal ditandai dengan belum tercapainya 5 indikator kinerja, namun Dinas Pariwisata Kabupaten Muna setiap tahunnya melakukan progres kemajuan dan peningkatan kinerja dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Muna. seperti melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai, Penataan Kebersihan Lingkungan di Objek Wisata, Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata, dan Melakukan Evaluasi dan Sosialisasi Terhadap Peran Dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pada Masyarakat Dalam Menjaga Kondusifitas Objek Wisata. Sama halnya dengan penelitian Elyas M. Yarawobi (2020) Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nabire Dalam Pengembangan Objek Wisata Hiu Paus di Taman Nasional Teluk Cendrawasih Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nabire dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus belum cukup baik, hambatan yang dialami

adalah keterbatasan sarana dan prasarana kepariwisataan yang dimiliki dinas kebudayaan dan pariwisata,

Tina (2019) Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah pengunjung Dinas Pariwisata melakukan berbagai promosi melalui media *online*, event-event, pameran, spanduk dan brosur. Peningkatan motivasi dengan memberi pelatihan pada masyarakat. Dinas Pariwisata melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar pulau tersebut dengan memberikan arahan dan sosialisasi dalam pembuatan souvenir.

Titus Karmala (2020) Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Hasil penelitian ini yaitu pengembangan objek wisata alam di Kota Sorong menunjukkan hasil yang belum maksimal, karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditentukan pada komponen sistem pengembangan pariwisata yang menjadi indikator pengembangan objek wisata alam.

Berdasarkan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan penelitian sebelumnya, ketiganya sudah menarik kesimpulan kinerja aparatur pada lokus masing-masing belum maksimal, dikarenakan masih adanya kekurangan di lokus penelitian masing-masing. Oleh karena itu, keaktifan dan keterlibatan langsung pimpinan sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa saja kekurangan untuk mengetahui keluhan dari masyarakat. Sehingga dapat membuat atau memberikan kebijakan terkait masalah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta analisis yang dilakukan di lokasi penelitian perihal Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Dalam Pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Muna dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Muna belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian lima indikator kinerja.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Muna yaitu sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan masih kurang memadai. Salah satunya keberadaan toilet umum dan kamar ganti serta ketersediaan lahan parkir yang masih sempit. Selain itu, kebersihan lingkungan objek wisata belum terjaga, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan Dinas Pariwisata.
3. Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Muna untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Meleura adalah:
 - a. Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai;
 - b. Penataan kebersihan lingkungan di objek wisata Pantai Meleura;
 - c. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Pariwisata; dan
 - d. Melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap peran dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pada masyarakat dalam menjaga kondusifitas objek wisata.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan, semoga dapat menjadi acuan bagi lokus penelitian dan peneliti selanjutnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Sedarmayanti. 2014. *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung: Refika Aditama.

- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rustadi, Saefulhakim dan Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan PustakaObor Indonesia
- Sembiring, M. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



